

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) adalah regulasi yang diterbitkan oleh pemerintah dengan harapan akan adanya transparansi, partisipasi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara guna mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governace*). SAP disusun oleh komite yang bertugas menyiapkan penyusunan konsep Rancangan Peraturan tentang SAP sebagai prinsip-prinsip akuntansi yang wajib diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Komite SAP bertujuan mengembangkan program-program pengembangan akuntabilitas dan manajemen keuangan pemerintahan, termasuk mengembangkan SAP dan mempromosikan penerapan standar tersebut (Noch, Junaedy, Lesmana, 2017).

Akuntansi berbasis akrual adalah suatu basis akuntansi dimana transaksi ekonomi dan peristiwa lainnya diakui, dicatat dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memperhatikan waktu kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Dalam akuntansi berbasis akrual, waktu pencatatan (*recording*) sesuai dengan saat terjadinya arus sumber daya, sehingga dapat menyediakan informasi yang paling komprehensif karena seluruh arus sumber daya dicatat (Syarienda, Basri, Fahlevi, 2018).

Secara konseptual, akuntansi berbasis akrual dipercaya dapat menghasilkan informasi yang lebih akuntabel dan transparan dibandingkan

dengan akuntansi berbasis kas. Akuntansi berbasis akrual mampu mendukung terlaksananya perhitungan biaya pelayanan publik dengan lebih wajar. Nilai yang dihasilkan mencakup seluruh beban yang terjadi, tidak hanya jumlah yang telah dibayarkan. Dengan memasukkan seluruh beban, baik yang sudah dibayar maupun yang belum dibayar, akuntansi berbasis akrual dapat menyediakan pengukuran yang lebih baik, pengakuan yang tepat waktu, dan pengungkapan kewajiban dimasa mendatang. Dalam rangka pengukuran kinerja, informasi berbasis akrual dapat menyediakan informasi mengenai penggunaan sumber daya ekonomi yang sebenarnya (KSAP 2010).

Basis akrual memiliki manfaat yang baik bagi sektor pemerintahan diantaranya meningkatnya kualitas dari akuntabilitas yang disebabkan adanya penyajian laporan keuangan pemerintah beserta beberapa perubahannya, selain itu arus pendanaan dan aktivitas pemerintah juga jelas tersaji dalam basis akrual dan memudahkan untuk mengevaluasi bagaimana pemerintah telah mendanai dan memenuhi kewajibannya kemudian bagaimana keefisienan pelayanan yang disediakan serta mengukur apakah sumber daya yang tersedia sudah digunakan semestinya atau belum (Pratiwi, 2018).

Sumber daya yang digunakan dalam pengelolaan organisasi pemerintahan salah satunya adalah Sumber Daya Manusia (SDM). Sumber daya manusia dalam hal ini merupakan pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bekerja pada instansi pemerintah pusat, daerah, Kementerian dan sektor publik lainnya. Perubahan basis akuntansi yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 membuat para staf di pemerintahan harus meningkatkan

kemampuan dalam pengetahuan metode baru yang diterapkan pemerintah. Jika kualitas SDM tidak memadai maka permasalahan dalam penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual tidak akan berjalan semestinya. Maka dari itu SDM dalam sektor publik bagian keuangan memerlukan kompetensi khusus dibidangnya (Pratiwi, 2018).

Selain Sumber Daya Manusia (SDM), sarana pendukung dalam pengimplementasian Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrual adalah sarana pendukung seperti software, hardware dan jaringan serta insentif pegawai. Tentunya dalam suatu implementasi kebijakan akan ada kendala ataupun tantangan yang terjadi (Pratiwi, 2018).

Terdapat alasan mengapa penelitian mengenai penerapan akuntansi akrual pada pemerintah ini perlu dilakukan, terutama karena konsep akuntansi akrual di lingkungan pemerintah masih baru, dan juga amanat undang-undang agar pemerintah segera menggunakan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual, dan sepengetahuan peneliti di Indonesia khususnya di pemerintah daerah pemahaman tentang akuntansi berbasis akrual ini juga belum maksimal. Banyak faktor yang perlu diperhatikan dalam penerapan akuntansi berbasis akrual karena ada beberapa hal yang dapat menjadi hambatan atau kendala. Kompleksitas akuntansi berbasis akrual merupakan salah satu hal yang dapat menjadi hambatan dan menjadi salah satu alasan timbulnya penolakan terhadap perubahan basis akuntansi. Hal yang sama juga terjadi pada saat perubahan dari akuntansi berbasis kas menjadi akuntansi berbasis kas menuju akrual pada tahun 2005 lalu (Armel, Rasuli, Taufik, 2019).

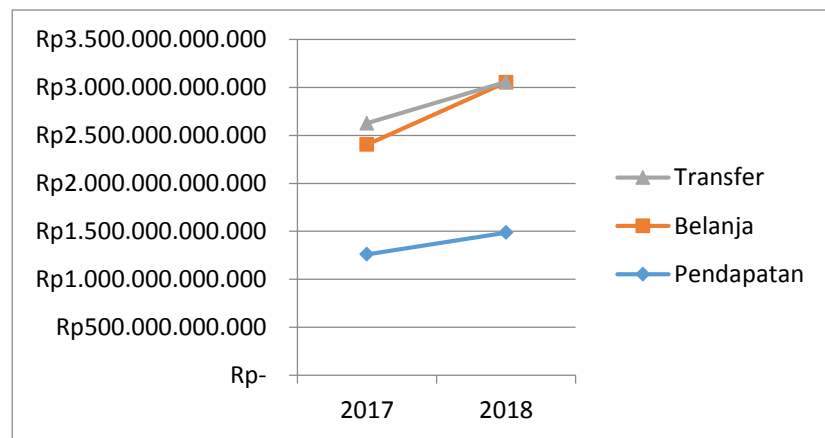
Sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Keuangan Kabupaten Gorontalo yakni melaksanakan administrasi dibidang pendapatan, keuangan dan aset daerah pada saat ini terus mengalami perbaikan dan penyempurnaan dari tahun ke tahun. Saat ini Badan Keuangan Kabupaten Gorontalo telah melaksanakan program pengelolaan keuangan daerah yang dijabarkan pada beberapa program kegiatan yang proses pelaksanaannya telah dilakukan melalui sistem komputerisasi yang terintegrasi mulai dari penyusunan anggaran, penerbitan Surat Penyediaan Dana, pemrosesan Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar, penerbitan Surat Perintah Penyediaan Dana sampai dengan proses siklus akuntansi telah menggunakan Sistem Komputerisasi SIMDA (LKIP BKD 2018).

Permasalahan yang terjadi adalah rasio kemandirian keuangan daerah minim, penerbitan sertifikat hak pemerintah daerah terlambat, mekanisme BPN masih parsial atau perorangan, tenaga pengelola keuangan berlatar belakang ilmu akuntansi masih terbatas, Nilai jual Objek Pajak (NJOP) belum disesuaikan dengan kondisi pasar, kewenangan pemerintah daerah untuk memperluas sumber-sumber pendapatan selain yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah masih terbatas, pemahaman aparat pengelola keuangan daerah yang belum menyeluruh akan Sistem Akuntansi Pemerintah, Kompetensi SDM pengelola keuangan daerah pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo masih terbatas (LKIP BKD 2018).

Berdasarkan permasalahan yang terjadi Arman (2019) juga mengatakan bahwa SKPD yang ada di kabupaten Gorontalo telah menerapkan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual. Masalah yang dihadapi dalam proses penerapan tersebut yaitu sumber daya manusia. Selain kompetensi sumber daya manusia sarana pendukung seperti teknologi informasi untuk penyebaran informasi masih belum lengkap.

Laporan keuangan Kabupaten Gorontalo periode 2017-2018

1. Laporan Realisasi Anggaran

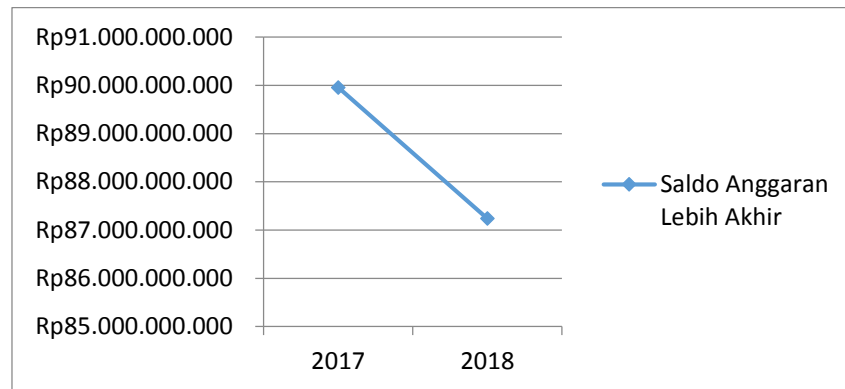


Sumber: badan-keuangan.gorontalokab.go.id

Gambar 1.1 Laporan Realisasi Anggaran

Berdasarkan gambar diatas dijelaskan bahwa pendapatan naik 8% pada tahun 2018, hal ini menunjukkan semua penerimaan rekening kas umum daerah pada periode tahun anggaran yang bersangkutan baik. Sedangkan pada belanja naik 16% pada 2018, hal ini menunjukkan pengeluaran dari rekening kas umum daerah terlalu banyak, tidak sesuai dengan pendapatan yang diperoleh pada tahun yang sama. Dan pada tahun 2017 terjadi transfer yang sangat banyak dibandingkan tahun 2018 yaitu 99% transfer yang dilakukan pada tahun 2017.

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

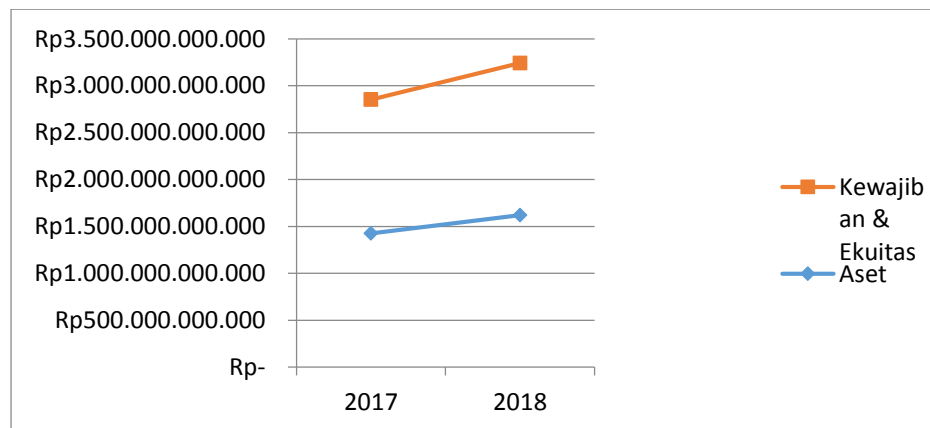


Sumber: badan-keuangan.gorontaloKab.go.id

Gambar 1.2 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Berdasarkan gambar diatas saldo anggaran pada tahun 2018 menurun 2% hal ini menunjukkan bahwa saldo anggaran lebih pada kabupaten gorontalo kurang baik.

3. Laporan Neraca

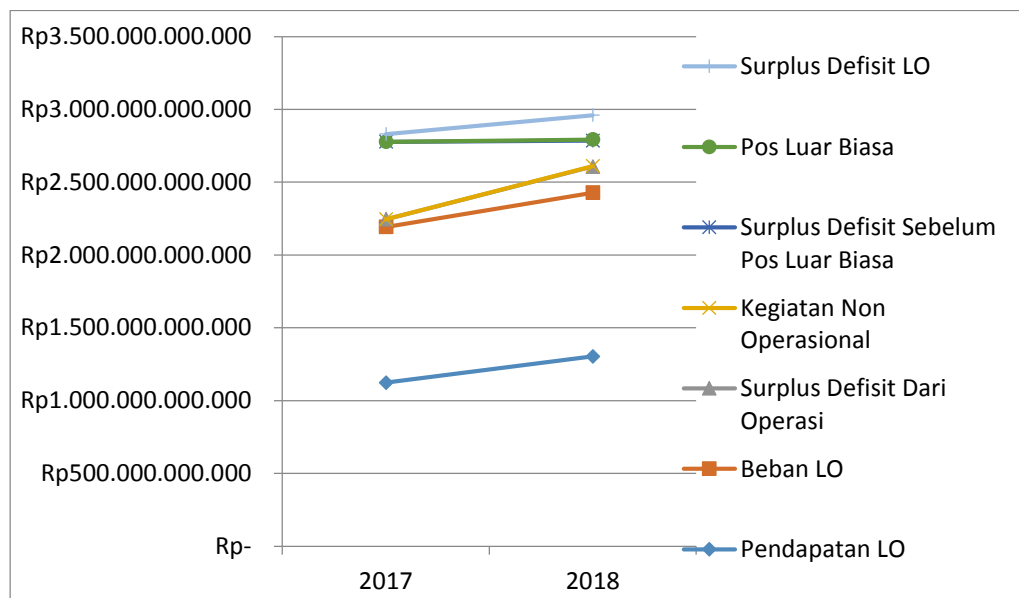


Sumber: badan-keuangan.gorontaloKab.go.id

Gambar 1.3 Neraca

Berdasarkan gambar diatas dijelaskan bahwa neraca pada tahun 2018 naik sebesar 6%, Hal ini menunjukkan komponen laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan entitas baik pada tahun yang bersangkutan.

4. Laporan operasional



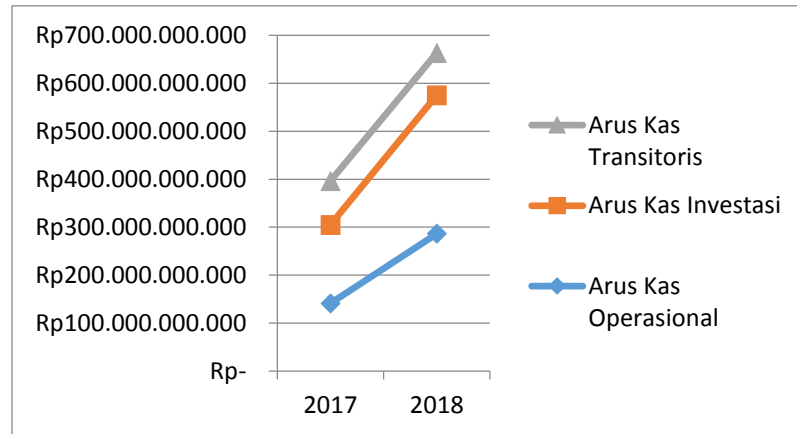
Sumber: badan-keuangan.gorontaloKab.go.id

Gambar 1.4 Laporan Operasional

Berdasarkan gambar diatas dijelaskan bahwa pendapatan laporan operasional pada tahun 2018 naik 8% hal ini menunjukkan bahwa hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan baik, Beban naik 2% hal ini menunjukkan bahwa penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode laporan kurang baik, Surplus devisit dari operasi naik 54% hal ini menunjukkan bahwa selisih lebih/kurang antara pendapatan Operasional dan beban selama satu periode pelaporan baik, kegiatan Non Operasional 92% hal ini menunjukkan bahwa

kegiatan non operasional baik, surplus devisit sebelum pos luar biasa turun 50%, pos luar biasa naik 84%, Surplus laporan operasional naik 52%.

5. Laporan Arus Kas

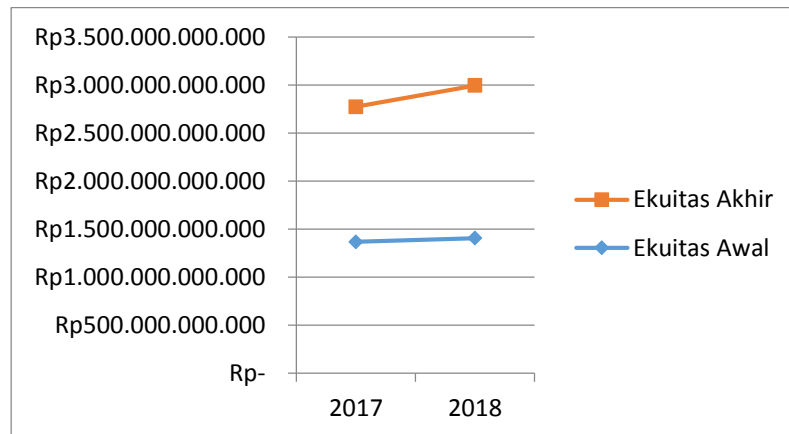


Sumber: badan-keuangan.gorontaloKab.go.id

Gambar 1.5 Laporan Arus Kas

Berdasarkan gambar diatas dijelaskan bahwa arus kas operasional pada tahun 2018 naik sebesar 34% hal ini menunjukkan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah baik, sedangkan arus kas investasi pada tahun 2018 naik sebesar 28% hal ini menunjukkan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas baik, dan untuk arus kas transitoris pada tahun 2018 turun sebesar 2% hal ini menunjukkan aktivitas penerimaan atau pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi dan investasi kurang baik.

6. Laporan perubahan ekuitas



Sumber: badan-keuangan.gorontalo.kab.go.id

Gambar 1.6 Laporan Perubahan Ekuitas

Berdasarkan gambar diatas dijelaskan bahwa pada tahun 2018 ekuitas awal naik sebesar 2% dan ekuitas akhir naik 6% hal ini menunjukkan ekuitas untuk semua hak yang dapat digunakan pemerintah baik.

Penelitian tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah telah banyak diteliti oleh peneliti sebelumnya. Diantaranya adalah Iznillah (2015) bahwa kualitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap kesiapan pemerintah dalam menerapkan akuntansi berbasis akrual, Komitmen organisasi berpengaruh terhadap kesiapan pemerintah dalam menerapkan akuntansi berbasis akrual, Teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap kesiapan pemerintah dalam menerapkan akuntansi berbasis akrual, dan komunikasi tidak berpengaruh terhadap kesiapan pemerintah dalam menerapkan akuntansi berbasis akrual. Demikian juga Nasution, Erlina, Sari (2016) bahwa SDM berpengaruh positif signifikan terhadap implementasi SAP berbasis akrual. Insentif berpengaruh positif signifikan terhadap implementasi

SAP berbasis akrual. Sarana pendukung berpengaruh negatif terhadap implementasi SAP berbasis akrual.

Penelitian yang sama dilakukan Sari, Suprasto, Dwirandra (2016) bahwa Kompetensi SDM tidak berpengaruh pada penerapan akuntansi berbasis akrual, sedangkan teknologi informasi berpengaruh positif pada penerapan akuntansi berbasis akrual. Pengaruh kompetensi SDM pada penerapan akuntansi berbasis akrual diperkuat oleh motivasi, tetapi motivasi tidak memperkuat pengaruh teknologi informasi pada penerapan akuntansi berbasis akrual. Sejalan dengan penelitian Pratiwi (2018) bahwa kompetensi SDM berpengaruh terhadap implementasi standar akuntansi pemerintah berbasis akrual, teknologi informasi tidak berpengaruh implementasi standar akuntansi pemerintah berbasis akrual, insentif tidak berpengaruh terhadap implementasi standar akuntansi pemerintah berbasis akrual, motivasi mampu memoderasi kompetensi SDM terhadap implementasi standar akuntansi pemerintah berbasis akrual, motivasi mampu memoderasi teknologi informasi terhadap implementasi standar akuntansi pemerintah berbasis akrual, dan motivasi mampu memoderasi insentif terhadap implementasi standar akuntansi pemerintah berbasis akrual.

Berdasarkan latar belakang dan fenomena yang terjadi maka peneliti tertarik untuk melakukan suatu kajian ilmiah dengan formulasi judul “**Pengaruh Sumber Daya Manusia Dan Teknologi Informasi Terhadap Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual**”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, identifikasi masalah dari penelitian ini yaitu

1. Kompetensi SDM pengelola keuangan daerah pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo masih terbatas.
2. Tenaga pengelola keuangan berlatar belakang ilmu akuntansi masih terbatas.
3. Teknologi Informasi yang digunakan sebagian masih belum lengkap.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka rumusan masalah adalah

1. Apakah pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) terhadap Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI?
2. Apakah pengaruh Teknologi Informasi terhadap Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI?
3. Apakah pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) dan Teknologi Informasi (TI) terhadap Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akruaI

2. Mengetahui pengaruh Teknologi Informasi terhadap penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual
3. Mengetahui pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Teknologi Informasi terhadap penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan guna memberikan manfaat bagi berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, sesuai dengan teori keagenan yang digunakan dalam penelitian ini, maka diharapkan penelitian dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu akuntansi khususnya akuntansi pemerintah. Dapat pula dijadikan sebagai pijakan dan referensi untuk penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, sesuai dengan teori keagenan yang digunakan dalam penelitian ini, maka manfaat penelitiannya yaitu:

- a. Bagi peneliti yaitu untuk menambah wawasan, pengalaman, dan pemahaman mengenai penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual di kabupaten Gorontalo

- b. Bagi pemerintah Kabupaten Gorontalo sebagai agen yaitu diharapkan dapat menjadi rujukan dan bahan evaluasi bagi pegawai untuk lebih mengoptimalkan perannya dan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia sehingga mampu bertanggung jawab terhadap amanah yang diberikan oleh masyarakat.
- c. Bagi masyarakat sebagai prinsipal yaitu diharapkan menjadi rujukan dan bahan informasi tentang akuntansi pemerintahan sehingga masyarakat sebagai prinsipal dapat mengetahui tindakan menyimpang yang dilakukan oleh pemerintah atau agen.